

Partisipasi Generasi Muda dan Dampak Sosialnya Pada Pemilihan Bupati Tahun 2024 di Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas

Ary Ramadany^{1*}, Hasyimsyah Nasution¹

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

<p>ARTICLE HISTORY <i>Received: 08-02-2025</i> <i>Accepted: 29-05-2025</i> <i>Publish: 31-06-2025</i></p> <p>Keywords: Hybrid Political Participation; Social Impact; Digital Literacy; Social Cohesion; 2024 Regent Election</p>	<p>Abstract: This study aims to analyze the level of youth participation in the 2024 Regent Election in Hutaraja Tinggi District, Padang Lawas Regency, and to identify the factors influencing their involvement in local political processes. The research employed a qualitative approach, utilizing field observations, in-depth interviews, and documentation gathered from young voters, community leaders, and local election organizers. Findings indicate that while youth participation is relatively high, it is uneven across villages. Greater involvement was observed in areas with better access to political information and education, as opposed to regions with limited political socialization. Interviews revealed that politically literate youth were motivated to participate by their desire for social change and regional development. In contrast, some first-time voters remained apathetic or were primarily influenced by family preferences. Social media played a significant role in enhancing political awareness among youth by disseminating information and digital campaign materials; however, it also posed risks of misinformation. Moreover, community leaders and local role models substantially influenced political behavior, particularly in rural areas. The study identified both encouraging and inhibiting factors: political awareness, social media influence, and community support fostered participation, whereas limited political education, apathy, and distrust toward the political system impeded it. The study concludes that increased access to education, information, and social support correlates with greater youth participation, underscoring the need for collaborative efforts among local governments, the election commission, educational institutions, and youth organizations to strengthen continuous political education and build trust in local democratic systems.</p>
<p>Kata Kunci: Partisipasi Pemuda; Politik; Media Pengaruh Agama; Literasi Sosial; Tokoh</p>	<p>Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat partisipasi politik generasi muda dalam Pemilihan Bupati 2024 di Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat keterlibatan mereka. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan pemilih muda, tokoh masyarakat, dan penyelenggara pemilu tingkat desa, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi generasi muda tergolong tinggi, namun belum merata; desa dengan akses informasi dan pendidikan baik cenderung lebih aktif dibanding area dengan sosialisasi politik terbatas. Temuan wawancara mengindikasikan bahwa literasi politik yang tinggi mendorong partisipasi karena keinginan akan perubahan dan pembangunan, sementara pemilih pemula sering kali apatis dan memilih berdasarkan pengaruh keluarga. Media sosial berperan signifikan dalam meningkatkan kesadaran politik melalui kampanye digital, meski rentan terhadap hoaks. Tokoh masyarakat dan figur panutan lokal juga memberikan pengaruh kuat, khususnya di pedesaan. Faktor pendorong meliputi kesadaran politik, pengaruh media sosial, dan dukungan komunitas, sedangkan faktor penghambat mencakup rendahnya pendidikan politik, apatisme, dan ketidakpercayaan terhadap sistem politik. Disimpulkan, akses terhadap pendidikan, informasi, dan dukungan sosial secara signifikan meningkatkan partisipasi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, KPU, lembaga pendidikan, dan organisasi kepemudaan diperlukan untuk memperkuat pendidikan politik berkelanjutan dan membangun kepercayaan generasi muda terhadap demokrasi lokal.</p>



© 2025 Authors

Under The License [CC-BY SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Corresponding Author: ✉ ramadany0404213032@uinsu.ac.id

 <https://doi.org/10.47766/almabhats.v10i1.2480>

PENDAHULUAN

Partisipasi pemilih pemuda pemudi dalam pemilu merupakan salah satu indikator penting dalam menjaga demokrasi yang sehat. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran vital dalam menentukan arah dan masa depan daerah melalui pilihan politik mereka, karena pemilihan kepala daerah secara langsung pada dasarnya bertujuan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai demokrasi yang tecermin dalam figur pemimpin terpilih (Lionardo et al., 2021). Terkhusus di wilayah Sumatera Utara, partisipasi ini menjadi krusial karena pola komunikasi politik eksekutif dalam proses penyusunan kebijakan sangat memengaruhi efektivitas pembangunan daerah (Nasution et al., 2024). Hal ini berdampak pada terpilihnya pejabat publik yang memiliki tanggung jawab strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat (Minan et al., 2024).

Rendahnya partisipasi pemuda dalam pemilu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya pemahaman tentang pentingnya pemilu akibat literasi komunikasi politik yang masih lemah hingga potensi ketidakpuasan terhadap dinamika politik lokal (Mardhiah et al., 2024). Salah satu penghambat signifikan dalam proses demokrasi adalah praktik politik dinasti yang sering kali dianggap sebagai penghambat kemajuan demokrasi karena dapat memicu penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara (Azizah et al., 2021). Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai sebab-sebab di balik fenomena ini di Kecamatan Hutaraja Tinggi, serta mencari solusi untuk meningkatkan partisipasi mereka melalui edukasi pemilih yang mampu memperkuat fondasi demokrasi (Wahyuni et al., 2023).

Kecamatan Hutaraja Tinggi, sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Utara, memiliki karakteristik sosial dan budaya yang memengaruhi keterlibatan publik dalam proses politik. Pemuda-pemudi di daerah ini kerap kali menghadapi tantangan dalam menyuarakan aspirasi politik mereka yang dipengaruhi oleh norma budaya, tradisi, hingga persepsi gender yang ada di masyarakat (Mardhiah et al., 2024). Dengan kondisi tersebut, analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi pemilih muda menjadi sangat relevan. Penelitian ini akan mempertimbangkan faktor internal seperti kesadaran politik, serta faktor eksternal seperti pemanfaatan modal sosial dan kepercayaan dalam komunitas pemilih untuk menjembatani partisipasi dalam pemilu (Baharuddin et al., 2023).

Selain itu, generasi muda cenderung lebih terhubung dengan informasi melalui media sosial, yang dapat memengaruhi sikap dan perilaku politik mereka secara signifikan. Penggunaan platform digital seperti Instagram telah terbukti menjadi instrumen efektif dalam membangun citra diri (personal branding) kandidat dan memenangkan simpati publik dalam pemilihan kepala daerah (Sugiharti & Aras, 2021). Akses terhadap informasi yang tepat melalui teknologi digital di era Revolusi Industri 4.0 menjadi keharusan dalam pemasaran politik modern untuk mempromosikan kandidat secara efektif (Priyowidodo et al., 2019). Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana media sosial digunakan sebagai inovasi teknologi untuk

merangsang partisipasi pemilih muda selama pemilihan bupati tahun 2024 di Kecamatan Hutaraja Tinggi (Lionardo et al., 2021).

Isu-isu sosial dan ekonomi yang berkembang di masyarakat, seperti pengangguran dan pendidikan, juga mempengaruhi sikap dan minat pemilih muda. Jika mereka merasa kepentingan dan aspirasi mereka diabaikan dalam proses politik, maka partisipasi mereka dapat semakin menurun (Al Izzati et al., 2024). Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi pemuda pemudi di Hutaraja Tinggi dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam pemilihan bupati mendatang.

Lebih lanjut, penting untuk memahami polarisasi dalam pandangan politik di kalangan pemuda. Di tengah besarnya pengaruh media massa dan media sosial, informasi yang salah atau bias dapat memperburuk apatisme politik di kalangan pemilih muda. Penelitian ini akan melakukan analisis menyeluruh terhadap cara informasi dan tata kelola pemilu mempengaruhi pandangan politik pemuda, serta dampaknya terhadap partisipasi mereka (Fernández Gómez et al., 2025).

Akhirnya, hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memberi kontribusi pada pengembangan teori politik dan demokrasi, tetapi juga memberikan masukan praktis bagi stakeholder di Hutaraja Tinggi, termasuk pemerintah daerah dan lembaga pendidikan, untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi politik pemuda. Dengan merangkul generasi muda dan mendengarkan suara mereka, kita dapat menciptakan masa depan politik yang lebih inklusif dan responsive

artisipasi politik generasi muda merupakan indikator vital dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat dan inklusif di tingkat lokal maupun nasional. Pemuda tidak hanya berperan sebagai penyumbang suara elektoral, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam membangun akuntabilitas dari bawah guna mengatasi krisis tata kelola melalui partisipasi yang organik (Bano, 2025). Keterlibatan aktif dalam pemilihan langsung terbukti mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara dan politik secara signifikan (Al Izzati et al., 2024). Oleh karena itu, memahami dinamika partisipasi pemuda menjadi krusial untuk mencegah politisasi hukum oleh legislator yang hanya mengikuti kepentingan politik rezim tertentu (Minan et al., 2024).

Meskipun memiliki peran strategis, fenomena di lapangan sering kali menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi demografi pemuda dengan realitas partisipasi politik mereka. Rendahnya literasi komunikasi politik menjadi penghambat utama karena membuat individu sulit terlibat aktif dan rentan terhadap manipulasi oleh pihak yang memiliki kepentingan politik tertentu (Mardhiah et al., 2024). Di sisi lain, praktik dominasi ekonomi dan klientelisme dalam pemilihan sering kali mereproduksi ketimpangan sosial dan menghambat kemunculan kandidat yang tidak memiliki kapital besar (Baharuddin et al., 2023). Hal ini diperburuk oleh keberadaan dinasti politik yang cenderung memanfaatkan fasilitas negara dan melemahkan integritas proses demokrasi di tingkat lokal (Azizah et al., 2021).

Kecamatan Hutaraja Tinggi di Kabupaten Padang Lawas menjadi locus yang menarik untuk diteliti mengingat karakteristik geografisnya, di mana wilayah dengan tantangan akses dan infrastruktur sering kali menghadapi kendala dalam optimalisasi tata kelola pelayanan publik (Madubun, 2024). Pemuda di daerah tersebut menghadapi hambatan struktural terkait ketidakpastian hukum dalam masa jabatan kepala daerah yang dipicu oleh kontradiksi norma dalam kebijakan pemilihan serentak (Ramadani et al., 2025). Selain itu, adanya perubahan regulasi yang menggeser mekanisme pemilihan dari demokrasi langsung ke arah sistem perwakilan tradisional berisiko membatasi hak partisipasi langsung masyarakat (Yarni et al., 2024).

Dalam konteks Pemilihan Bupati 2024, faktor akses informasi dan media digital memegang peranan sentral dalam membentuk perilaku politik pemuda. Media sosial, khususnya Instagram, kini menjadi instrumen utama bagi kandidat untuk membangun citra diri (personal branding) guna meraih simpati dan kepercayaan dari konstituen (Sugiharti & Aras, 2021). Namun, penggunaan teknologi digital juga menyimpan risiko besar jika tidak dibarengi dengan regulasi yang kuat, terutama terkait celah pendanaan partai politik oleh korporasi yang dapat mengancam integritas pemilihan (Ilham & Sari, 2024). Fenomena ini menunjukkan adanya kegagalan konsolidasi demokrasi akibat intervensi sistematis melalui aturan hukum yang menguntungkan elit penguasa (Asrinaldi & Yusoff, 2023).

Dalam konteks pemilihan bupati, keterlibatan generasi muda juga berperan penting dalam membentuk iklim demokrasi yang inklusif di tingkat lokal. Pemuda tidak hanya bertindak sebagai pemilih, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mampu mempengaruhi opini publik dan arah diskursus politik di lingkungannya. Ketika ruang partisipasi dibuka secara adil dan transparan, pemuda cenderung menunjukkan sikap politik yang lebih konstruktif dan partisipatif, sehingga mampu memperkuat kepercayaan sosial antarwarga (Harahap et al., 2025). Sebaliknya, eksklusif politik terhadap pemuda berpotensi melahirkan sikap skeptis terhadap institusi demokrasi dan memperlemah legitimasi hasil pemilu di mata masyarakat.

Selain itu, kualitas partisipasi politik pemuda juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas literasi politik dan akses terhadap informasi yang kredibel. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman terhadap proses dan nilai-nilai demokrasi dapat mendorong pemilih muda bersikap pasif atau bahkan terjebak dalam polarisasi yang tidak sehat (Yarni et al., 2024). Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berdampak pada relasi sosial di tingkat desa, terutama jika perbedaan pilihan politik tidak diimbangi dengan sikap toleran dan kesadaran kolektif. Oleh karena itu, penguatan pendidikan politik dan tata kelola pemilu yang partisipatif menjadi faktor kunci untuk memastikan bahwa keterlibatan pemuda tidak hanya tinggi secara kuantitas, tetapi juga berdampak positif terhadap keharmonisan sosial masyarakat lokal (Widyastuti et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam partisipasi generasi muda pada Pemilihan Bupati Tahun 2024 di Kecamatan Hutaraja Tinggi serta dampak sosial yang menyertainya. Penelitian ini tidak

hanya akan memotret faktor pendorong dan penghambat, tetapi juga mengevaluasi implikasi sosial dari keterlibatan politik pemuda terhadap kerukunan dan dinamika masyarakat setempat. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan sosiologi politik dan kontribusi praktis bagi stakeholder terkait, seperti KPU dan pemerintah daerah, dalam merancang pendidikan politik yang tidak hanya meningkatkan suara, tetapi juga merawat kohesi sosial.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis fenomena partisipasi politik secara mendalam, melampaui sekadar representasi angka kuantitatif (Creswell & Poth, 2020). Pendekatan ini dipilih guna menggali makna subjektif dan dampak sosial yang timbul dari keterlibatan generasi muda pada Pemilihan Bupati Tahun 2024 di Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas. Fokus utama penelitian diarahkan untuk mendeskripsikan tingkat partisipasi, bentuk keterlibatan, serta implikasi sosial yang terbentuk dalam interaksi masyarakat selama tahapan pemilu berlangsung.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menentukan subjek penelitian melalui teknik purposive sampling, yang melibatkan informan kunci terdiri atas pemilih muda berusia 17-30 tahun, tokoh masyarakat, dan penyelenggara pemilu tingkat desa yang representatif. Pengambilan data dilaksanakan melalui triangulasi teknik utama, yaitu observasi lapangan untuk mengamati dinamika kampanye dan perilaku pemilih di TPS; wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk menggali motivasi, persepsi, dan dampak sosial akibat perbedaan pilihan; serta studi dokumentasi guna menghimpun data sekunder dan arsip pemilihan yang relevan.

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Data mentah dari lapangan direduksi dengan memilah informasi penting dan mengelompokkannya ke dalam tema spesifik seperti faktor pendorong, penghambat, dan dampak sosial partisipasi. Selanjutnya, temuan disajikan dalam narasi deskriptif yang sistematis (*data display*) dan diakhiri dengan verifikasi simpulan untuk menjawab rumusan masalah mengenai dinamika partisipasi generasi muda beserta implikasi sosialnya di lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi politik generasi muda dan dampak sosial dipahami sebagai relasi kausal yang bersifat dialektis. Partisipasi politik yang inklusif dan berorientasi pada nilai-nilai deliberatif berpotensi memperkuat kohesi sosial melalui peningkatan kepercayaan, solidaritas, dan keterlibatan kolektif dalam kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, partisipasi yang bersifat eksklusif, emosional, dan minim literasi politik dapat memperbesar risiko polarisasi sosial, terutama ketika perbedaan pilihan politik tidak dikelola dalam ruang dialog yang sehat. Sejumlah kajian menegaskan bahwa

kualitas partisipasi, bukan semata tingkat partisipasi, menjadi faktor penentu utama dalam membentuk dampak sosial pasca-pemilu di tingkat lokal (Baharuddin et al., 2023).

Dalam konteks generasi muda, relasi tersebut menjadi semakin kompleks seiring dengan dominasi ruang digital sebagai medium utama ekspresi politik. Aktivisme siber yang masif dapat berfungsi sebagai katalis penguatan kesadaran politik kolektif, namun juga berpotensi mempercepat difusi narasi polaristik jika tidak diimbangi dengan etika komunikasi politik yang memadai. Penelitian menunjukkan bahwa algoritma media sosial cenderung memperkuat bias afiliasi politik, sehingga mempersempit ruang dialog lintas pandangan dan meningkatkan fragmentasi sosial di tingkat komunitas (Priyowidodo et al., 2019). Oleh karena itu, pengelolaan partisipasi politik pemuda perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan kuantitas keterlibatan, tetapi juga pada pembentukan budaya politik yang inklusif dan berorientasi pada kohesi sosial dalam ekosistem demokrasi lokal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika partisipasi politik generasi muda di Kecamatan Hutaraja Tinggi tidak bersifat tunggal, melainkan bervariasi secara signifikan berdasarkan tingkat literasi dan akses informasi yang dimiliki. Pada kelompok pemuda yang memiliki tingkat pendidikan menengah ke atas dan aktif dalam jejaring sosial, pola partisipasi yang muncul cenderung bersifat rasional-kritis. Hal ini dapat diamati dari motivasi kedatangan mereka ke TPS yang tidak sekadar untuk menggugurkan kewajiban elektoral, tetapi didasari oleh kalkulasi rasional untuk mendorong perubahan struktural di daerah, terutama terkait isu-isu krusial seperti lapangan pekerjaan dan akses pendidikan yang selama ini dirasa belum optimal bagi pengembangan kapasitas pemuda.

"Kami memilih karena ingin ada perubahan nyata, terutama dalam lapangan pekerjaan dan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak muda di sini." (Informan RZ, Mahasiswa, 22 Tahun).

Pernyataan tersebut secara substansial menegaskan bahwa keterlibatan politik pada segmen pemuda terpelajar bukan sekadar ritual demokrasi lima tahunan, melainkan merupakan respons langsung terhadap kegelisahan sosial-ekonomi yang mereka alami. Narasi ini mengindikasikan tingginya *political efficacy* (kemanjuran politik), di mana hak suara dipandang sebagai instrumen tawar (*bargaining power*) yang efektif untuk menuntut kebijakan publik yang lebih inklusif. Artinya, bagi kelompok ini, partisipasi politik berbanding lurus dengan harapan akan mobilitas sosial, sehingga preferensi mereka lebih ditentukan oleh visi-misi kandidat yang konkret daripada sekadar ikatan emosional atau primordial.

Selain kelompok kritis, penelitian ini juga menemukan adanya kelompok pemilih pemula yang memandang partisipasi politik secara pragmatis akibat minimnya literasi dan kuatnya dominasi preferensi keluarga dalam menentukan pilihan.

"Saya kurang tahu siapa calon-calonnya, yang penting datang saja supaya tidak disalahkan," (Informan MH, Pemilih Pemula, 19 Tahun).

Pernyataan ini merefleksikan bahwa pada segmen demografi tertentu, hak suara belum sepenuhnya menjadi ekspresi kedaulatan individu, melainkan bentuk konformitas sosial untuk menjaga harmoni di lingkungan keluarga. Absennya pemahaman substantif mengenai visi-misi kandidat mengindikasikan bahwa proses sosialisasi politik di wilayah pinggiran belum mampu menyentuh aspek kognitif pemuda, sehingga partisipasi yang terbentuk hanyalah mobilisasi semu yang rentan terhadap distorsi demokrasi.

Berdasarkan reduksi data dari observasi lapangan dan wawancara mendalam, penelitian ini mengkristalisasi tiga tema utama yang menjadi kerangka analisis fenomena di Kecamatan Hutaraja Tinggi. Tema-tema tersebut meliputi: (1) Dinamika Bentuk Partisipasi, yang membedah variasi keterlibatan pemuda mulai dari kehadiran fisik di TPS hingga aktivisme digital; (2) Determinan Perilaku Politik, yang memetakan kontestasi antara faktor pendorong seperti literasi politik dengan faktor penghambat berupa apatisme dan pragmatisme; serta (3) Implikasi Sosial Partisipasi, yang menyoroti dampak ganda keterlibatan politik pemuda terhadap penguatan kohesi sosial dan tantangan polarisasi akibat arus informasi digital. Ketiga tema ini saling berinteraksi membentuk lanskap demokrasi lokal yang kompleks di wilayah studi.

Dinamika Bentuk Partisipasi Generasi Muda

Transformasi bentuk partisipasi tersebut membawa implikasi penting terhadap kualitas demokrasi lokal. Partisipasi elektoral yang rendah namun diimbangi dengan aktivitas digital yang tinggi menunjukkan adanya pergeseran orientasi politik pemuda dari ranah institusional ke ranah diskursif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemuda tidak sepenuhnya apatis terhadap politik, melainkan mengekspresikan kepedulian mereka melalui medium yang dianggap lebih relevan, fleksibel, dan responsif terhadap aspirasi generasi muda. Namun demikian, beberapa studi menegaskan bahwa partisipasi digital yang tidak terintegrasi dengan mekanisme formal pemilu berpotensi menciptakan kesenjangan antara ekspresi politik dan pengambilan keputusan nyata, sehingga suara pemuda tetap kurang terakomodasi dalam kebijakan publik (Al Izzati et al., 2024; Nuradhawati et al., 2022).

Lebih jauh, intensitas partisipasi digital juga berimplikasi langsung terhadap dinamika sosial di tingkat komunitas. Diskursus politik yang berkembang di ruang digital sering kali terbawa ke interaksi luring, memengaruhi relasi sosial antarindividu dan kelompok di masyarakat desa. Ketika narasi politik yang beredar bersifat inklusif dan edukatif, partisipasi digital dapat memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kesadaran politik kolektif. Sebaliknya, jika didominasi oleh ujaran provokatif atau informasi yang bias, ruang digital justru berpotensi memperdalam polarisasi dan memperlemah kohesi sosial masyarakat lokal (Andriyendi et al., 2023; Fernández Gómez et al., 2025). Oleh karena itu, memahami keterkaitan antara partisipasi elektoral dan digital menjadi krusial untuk merumuskan strategi peningkatan partisipasi pemuda

yang tidak hanya efektif secara politik, tetapi juga kondusif bagi stabilitas sosial di Kecamatan Hutaraja Tinggi.

Determinan Perilaku Politik

Perilaku politik generasi muda di Kecamatan Hutaraja Tinggi dideskripsikan sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh dua kutub determinan yang saling bertolak belakang, yaitu faktor pendorong internal berupa kesadaran kritis dan faktor penghambat eksternal berupa hambatan struktural. Secara eksplanatif, faktor pendorong bekerja lebih efektif pada kelompok pemuda terdidik yang memiliki akses terhadap media sosial dan jejaring komunitas sebagai sumber informasi politik, sehingga terbentuk motivasi otonom untuk berpartisipasi dalam pemilu demi mendorong perubahan di tingkat daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital dan politik berkontribusi signifikan terhadap penolakan praktik politik transaksional serta penguatan sikap rasional pemilih muda (Budiawan et al., 2025; Zahro et al., 2023).

Sebaliknya, faktor penghambat muncul akibat rendahnya literasi politik dan melemahnya kepercayaan terhadap aktor politik yang dipersepsikan tidak konsisten dalam merealisasikan janji kampanye. Kondisi tersebut mendorong sebagian pemuda bersikap pragmatis atau sekadar mereproduksi preferensi politik keluarga dan lingkungan sosial tanpa pemahaman kritis. Relasi kausal antara faktor pendorong dan penghambat ini menegaskan bahwa tingkat partisipasi politik pemuda tidak berdiri sendiri, melainkan sangat bergantung pada kualitas ekosistem informasi politik yang tersedia. Semakin terbuka dan kredibel akses informasi yang diterima pemuda, semakin kuat pula daya tahan mereka terhadap apatisme politik dan manipulasi elektoral (Hapsari et al., 2022; Kadir, 2022).

Implikasi Sosial Partisipasi

Berangkat dari kondisi tersebut, pengelolaan partisipasi politik generasi muda menjadi faktor kunci dalam menjaga keseimbangan antara dinamika demokrasi dan stabilitas sosial masyarakat lokal. Partisipasi yang disertai dengan literasi politik dan digital yang memadai memungkinkan pemuda berperan sebagai penyeimbang diskursus publik, sekaligus menjadi agen moderasi dalam meredam eskalasi konflik berbasis perbedaan pilihan politik. Sejumlah kajian menegaskan bahwa ketika pemuda dilibatkan dalam ruang dialog politik yang deliberatif dan berbasis nilai-nilai lokal, partisipasi mereka cenderung berkontribusi positif terhadap penguatan toleransi, kepercayaan sosial, dan keberlanjutan relasi antarwarga pasca-pemilu (Gunaisah et al., 2016; Kudus et al., 2024).

Sebaliknya, absennya mekanisme edukasi politik dan kontrol informasi berpotensi menjadikan ruang digital sebagai arena reproduksi polarisasi yang sulit diredam. Polarisasi digital tidak hanya berhenti pada perbedaan pandangan politik, tetapi dapat merembet pada fragmentasi sosial yang memengaruhi hubungan kekerabatan, aktivitas ekonomi, dan praktik keagamaan di tingkat komunitas. Dalam konteks ini, partisipasi

politik pemuda perlu dipahami tidak semata sebagai hak demokratis, tetapi juga sebagai tanggung jawab sosial yang menuntut kedewasaan politik dan kesadaran kolektif. Oleh karena itu, sinergi antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan komunitas lokal menjadi prasyarat penting untuk memastikan bahwa partisipasi generasi muda di Kecamatan Hutaraja Tinggi berfungsi sebagai kekuatan integratif, bukan sumber disintegrasi sosial (Khairussalam et al., 2024; Khan et al., 2022).

Implikasi teoretis dari temuan tersebut menunjukkan bahwa konsep kewargaan digital (*digital citizenship*) perlu dipahami secara kontekstual dalam kerangka demokrasi lokal, khususnya di wilayah perdesaan yang memiliki ikatan sosial dan nilai adat yang kuat. Transformasi partisipasi politik pemuda yang didorong oleh teknologi digital tidak secara otomatis menghasilkan penguatan demokrasi substantif, melainkan sangat bergantung pada kapasitas literasi politik, etika bermedia, serta mekanisme sosial yang mengatur interaksi antarwarga. Sejumlah studi menegaskan bahwa demokrasi lokal yang berada dalam fase transisi digital membutuhkan model partisipasi yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan praktik politik modern agar tidak terjadi disrupsi sosial yang berlebihan (Khan et al., 2022; Warganegara, 2021).

Secara praktis, temuan ini mengisyaratkan pentingnya perumusan strategi kebijakan yang berorientasi pada penguatan literasi politik dan digital generasi muda secara berkelanjutan. Program pendidikan pemilih, forum diskusi lintas kelompok, serta pelibatan pemuda dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa dapat menjadi instrumen strategis untuk mengonversi partisipasi digital menjadi kontribusi sosial yang konstruktif. Tanpa intervensi kebijakan yang terarah, potensi besar generasi muda sebagai motor pembaruan demokrasi justru berisiko terfragmentasi dalam polarisasi digital yang memperlemah kohesi sosial. Oleh karena itu, penguatan peran pemuda dalam demokrasi lokal perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari pembangunan sosial yang menyeimbangkan inovasi politik dengan keberlanjutan harmoni masyarakat Kecamatan Hutaraja Tinggi (Khairussalam et al., 2024; Kudus et al., 2024).

Secara ringkas, penelitian ini menemukan bahwa profil partisipasi politik generasi muda di Kecamatan Hutaraja Tinggi menunjukkan karakteristik yang ambivalen dan asimetris; secara kuantitas elektoral tingkat partisipasi tergolong tinggi, namun secara kualitas masih terfragmentasi tajam antara kelompok pemilih rasional-kritis yang berbasis pada literasi digital dengan kelompok pemilih pragmatis yang masih bergantung pada mobilisasi tradisional dan pengaruh keluarga. Temuan kunci lainnya adalah terjadinya pergeseran arena partisipasi yang signifikan dari ruang fisik ke ruang digital, yang meskipun berhasil meningkatkan kesadaran politik, namun secara simultan memunculkan kerentanan sosial baru berupa potensi segregasi komunitas akibat polarisasi informasi (hoaks) yang tidak terverifikasi di tengah masyarakat.

Temuan ini memberikan perspektif yang lebih nuansatif dibandingkan studi Jayawinangun dan Nugroho yang cenderung memosisikan media digital sebagai

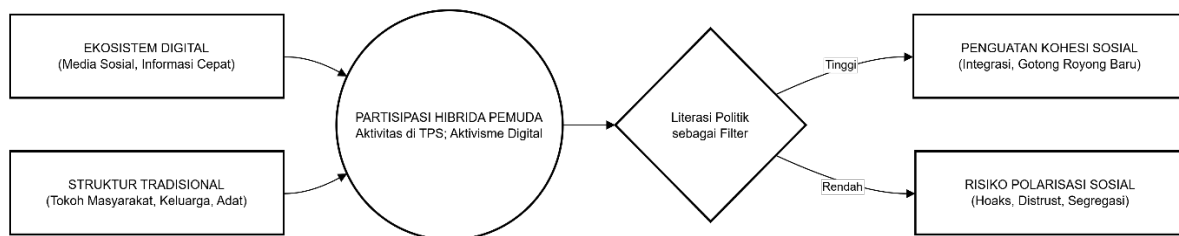
pendorong linear kesadaran politik pemuda. Penelitian ini justru menyingkap realitas paradoksal di Hutaraja Tinggi, di mana tingginya eksposur digital tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas partisipasi akibat rendahnya literasi verifikasi yang memicu penyebaran hoaks, berbeda dengan asumsi idealisme partisipasi digital semata. Selain itu, hasil ini mengafirmasi tesis Irliandi et al. mengenai sentralitas peran tokoh masyarakat dalam membentuk preferensi politik di wilayah pedesaan, namun sekaligus menandai adanya pergeseran otoritas ketika pemuda mulai menegosiasikan pengaruh tradisional tersebut dengan informasi alternatif dari media sosial. Refleksi dari fenomena ini menandakan bahwa partisipasi politik generasi muda sedang berada dalam fase transisi yang rawan; meskipun antusiasme elektoral telah tumbuh, hal tersebut belum diimbangi dengan kedewasaan sosial dalam mengelola perbedaan pendapat, sehingga rentan memicu friksi sosial di tingkat akar rumput.

Ketimpangan kualitas partisipasi dan kerentanan sosial yang ditemukan dalam penelitian ini terjadi akibat interaksi kompleks antara faktor struktural dan psikologis yang melingkupi pemuda Hutaraja Tinggi. Secara struktural, disparitas akses pendidikan politik dan infrastruktur informasi antar-desa menyebabkan kesenjangan kognitif; pemuda di wilayah maju memiliki otonomi rasional untuk memilih, sementara pemuda di wilayah pinggiran terjebak dalam pragmatisme karena minimnya akses terhadap diskursus kebijakan publik yang substansial. Secara psikologis, fenomena ini diperburuk oleh ketidakpercayaan (*distrust*) terhadap integritas kandidat yang sering kali diamplifikasi oleh narasi negatif di media sosial, sehingga menurunkan motivasi partisipasi menjadi sekadar formalitas menggugurkan kewajiban tanpa kesadaran kritis akan dampak jangka panjangnya bagi pembangunan daerah.

Merespons dinamika tersebut, diperlukan perubahan strategi intervensi yang tidak lagi bertumpu pada sosialisasi elektoral konvensional, melainkan pada pendekatan edukasi kewargaan digital yang kolaboratif. Tindakan mendesak yang direkomendasikan adalah inisiasi program "Literasi Politik Digital" yang melibatkan sinergi antara KPU, pemerintah daerah, dan organisasi kepemudaan lokal untuk membentengi pemuda dari disinformasi dan polarisasi. Praktik sosialisasi harus bertransformasi dari model satu arah menjadi dialog berbasis komunitas, di mana pemuda diberdayakan sebagai agen literasi untuk memfilter informasi di lingkungan mereka sendiri. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa partisipasi yang tumbuh tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga berkualitas dalam menjaga kohesi sosial pasca-pemilu.

Temuan penelitian ini menawarkan wawasan empiris yang memperkaya sekaligus memberikan nuansa baru terhadap studi-studi sebelumnya mengenai perilaku politik di tingkat lokal. Selaras dengan penelitian Irliandi et al., studi ini mengonfirmasi bahwa tokoh masyarakat masih memegang peranan sentral dalam memobilisasi partisipasi di wilayah pedesaan yang paternalistik. Namun, temuan ini memberikan perspektif kritis terhadap tesis Jayawinangun dan Nugroho; jika mereka menekankan dampak positif media digital dalam meningkatkan kesadaran politik, penelitian ini justru menemukan bahwa tanpa literasi yang memadai, eksposur digital juga membawa residu negatif

berupa polarisasi sosial akibat hoaks. Selain itu, hasil ini melengkapi kajian Lestari et al. dengan menunjukkan bahwa peran vital pemuda dalam demokrasi tidak bersifat statis, melainkan sangat bergantung pada ekosistem informasi yang membentuk preferensi mereka.



Gambar 1: Model Partisipasi Politik Hibrida dan Residu Sosial

Gambar 1 menjelaskan mekanisme Model Partisipasi Politik Hibrida dalam membentuk dinamika sosial masyarakat yang terdiri dari serangkaian tahapan yaitu konvergensi pengaruh ekosistem digital dan struktur tradisional, pembentukan aktivitas partisipasi ganda (fisik dan siber), serta peran krusial literasi politik sebagai filter penentu output akhir berupa penguatan kohesi sosial atau risiko polarisasi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa orientasi partisipasi politik pemuda saat ini bersifat hibrida, menggabungkan aktivitas elektoral fisik dan aktivisme digital. Konsep interaksi politik yang terbentuk di Kecamatan Hutaraja Tinggi merupakan hasil konvergensi antara pengaruh ekosistem informasi modern melalui media sosial dengan struktur sosial tradisional yang masih kuat di masyarakat, di mana kedua elemen tersebut diproses oleh pemuda menjadi sebuah tindakan partisipasi ganda.

Lebih lanjut, dalam ruang lingkup penelitian, ditentukan bahwa literasi politik berfungsi sebagai filter krusial yang menentukan kualitas akhir dari partisipasi tersebut. Tanpa filter literasi yang memadai, tingginya intensitas partisipasi di ruang digital justru berisiko menghasilkan residu sosial negatif berupa polarisasi dan ketidakpercayaan (*distrust*), sedangkan literasi yang tinggi mampu mengarahkan partisipasi tersebut menjadi modal sosial yang memperkuat gotong royong dan kohesi komunitas.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dampak partisipasi dikelompokkan menjadi dua kategori outcome: penguatan kohesi sosial dan risiko polarisasi. Hasilnya, untuk mewujudkan transformasi demokrasi yang substantif, pemuda harus terlebih dahulu memiliki kompetensi verifikasi informasi sebelum terlibat dalam aktivisme siber. Hal ini didukung oleh studi Jayawinangun dan Nugroho yang menemukan bahwa kesadaran politik tanpa dibarengi literasi digital rentan disusupi agenda disinformasi yang memecah belah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi politik generasi muda di Kecamatan Hutaraja Tinggi telah bertransformasi menjadi partisipasi hibrida yang menggabungkan kehadiran elektoral dengan aktivisme digital, namun mengungkap temuan mengejutkan bahwa tingginya eksposur informasi tanpa literasi verifikasi justru memicu "residu negatif" berupa segregasi sosial dan hoaks, membantah asumsi bahwa digitalisasi otomatis melahirkan pemilih rasional. Nilai kebaruan riset ini terletak pada konsep "Model Partisipasi Politik Hibrida dan Residu Sosial" yang menawarkan kohesi sosial sebagai indikator keberhasilan pemilu melampaui sekadar kuantitas suara, meskipun keterbatasan lingkup studi pada satu kecamatan menuntut adanya penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah lebih luas untuk menguji validitas model ini dalam varian sosiologis berbeda guna merumuskan mitigasi polarisasi yang komprehensif.

REFERENSI

- Al Izzati, R., Dartanto, T., Suryadarma, D., & Suryahadi, A. (2024). Direct elections and trust in state and political institutions: Evidence from Indonesia's election reform. *European Journal of Political Economy*, 85. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2024.102572>
- Andriyendi, D. O., Nurman, S., & Dewi, S. F. (2023). Media Sosial dan Pengaruhnya terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pilkada. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 3(1), 101–111.
- Asrinaldi, A., & Yusoff, M. A. (2023). Power consolidation and its impact on the decline of democracy in Indonesia under President Jokowi. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2232579>
- Azizah, N., Nkwede, J. O., & Armoyu, M. (2021). The octopus-like power of Pesantren dynasty in the dynamics of local politics. *Cogent Social Sciences*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1962056>
- Baharuddin, T., Sairin, S., Qodir, Z., & Jubba, H. (2023). Form of Capital in Elections: Candidate Victory over Political Economy Domination. *International Journal of Interdisciplinary Civic and Political Studies*, 18(1), 77–96. <https://doi.org/10.18848/2327-0071/CGP/v18i01/77-96>
- Bano, M. (2025). *Fixing Governance from Below: Why Short Route of Accountability Cannot Solve the Education Crisis*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/9780197802236.001.0001>
- Budiawan, S. I. P., Syarifuddin, M., Sulistiani, M. I. I., Dirgantari, M. I. A. S., Sanmas, S. M., Eliyah, S. K. M., & Rosdawiyah, S. S. (2025). *Paradigma Baru dalam Ilmu Komunikasi: Kritis, Digital, Partisipatif*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2020). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*. Sage publications.
- Fernández Gómez, J. D., Pineda, A., & Hernández-Santaolalla, V. (2025). Regional political communication management in Spain: The scope and limits of strategic social media interaction. *Atlantic Journal of Communication*. <https://doi.org/10.1080/15456870.2025.2533226>
- Gunaisah, E., Saleh, Y. B., Nayan, N. B., & Caropeboka, R. M. (2016). Socio-economic and cultural sustainability in local wisdom management at local marine conservation area (KKLD) of Mayalibit Bay, Raja Ampat Regency, West Papua Province. *AACL*

- Bioflux*, 9(4), 901–909. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84987750114&partnerID=40&md5=e365459212c3627ef8be0852cd911035>
- Hapsari, M. A., Wardhani, S. H. R., Ariyani, N., & Andani, D. (2022). Bahaya Apatisme Pemuda terhadap Kehidupan Bernegara: Edukasi Partisipasi Politik Karang Taruna Ira Kusuma Yogyakarta. *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum Dan Humaniora*, 2(2), 105–117.
- Harahap, A. S., Nasution, F. R. A., Siregar, N. S., Jalinus, N., & Ernawati, E. (2025). Peran Kepemimpinan Digital di Era Pendidikan 4.0 dalam Mengelola SMK: Systematic Literature Review tentang Peluang dan Tantangan. *VOCATIONAL: Jurnal Inovasi Pendidikan Kejuruan*, 5(2), 70–79. <https://doi.org/10.51878/vocational.v5i2.5783>
- Ilham, T., & Sari, A. G. P. (2024). POLITICAL PARTY FINANCING REGULATION AND GAPS FOR CORPORATE DONATIONS: CASE OF THE DEVELOPING COUNTRY. *Journal of Governance and Regulation*, 13(1), 28–41. <https://doi.org/10.22495/jgrv13i1art3>
- Kadir, N. (2022). Media sosial dan politik partisipatif: Suatu kajian ruang publik, demokrasi bagi kaum milenial dan gen Z. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 4(2), 180–197.
- Khairussalam, K., Zulaikha, S., Nur, R. I., & Maimunah, S. (2024). Analisis Modal Sosial dalam Kepemimpinan Kepala Desa Sewangi: Studi Kasus Berdasarkan Teori Modal Sosial Putnam. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(2), 909–918.
- Khan, M. A. H., Oulasvirta, L. O., & Anttiroiko, A.-V. (2022). *Open governance in budgeting and financial reporting: A case study on the local governance of Bangladesh* (pp. 388–404). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-6684-5284-4.ch019>
- Kudus, I., Nurasa, H., Widianingsih, I., Karlina, N., & Jawan, J. A. (2024). From print to pixels: the institutional effects of transitioning to computer-based joint admission selection in Indonesian State Universities. *Cogent Education*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2428066>
- Lionardo, A., Kurniawan, R., Nasirin, C., Jaya, D. P., & Umanailo, M. C. (2021). *Innovation in the utilization of digital-based social media in readiness to organize concurrent regional head elections in the covid 19 pandemic era*. 3524–3529. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85121144491&partnerID=40&md5=1a827918f6fe6aeac417aeb4090661a7>
- Madubun, J. (2024). Public services in island sub-districts: Towards geography-based governance. *Australian Journal of Public Administration*, 83(3), 308–327. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12586>
- Mardhiah, A., Puspasari, C., Anismar, A. M. H., & Fazil, M. (2024). The Dynamics of Political Literacy among Coastal Women: An Exploration of Political Engagement in Lhokseumawe. *Journal of Ecohumanism*, 3(7), 2131–2139. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i7.4363>
- Minan, A., Arinanto, S., & Djohan, D. (2024). Local Chief Executive Political Accountability In Indonesia: A Historical-Legal Analysis. *Constitutional Review*, 10(1), 33–66. <https://doi.org/10.31078/consrev1012>
- Nasution, I. K., Kusmanto, H., Ardian, M., Nasution, F. A., & Indainanto, Y. I. (2024). Executive Political Communication in Drafting Regional Revenue and Expenditure Budgets in North Sumatra Province, Indonesia. *WSEAS Transactions on Environment and Development*, 20, 76–86. <https://doi.org/10.37394/232015.2024.20.9>
- Nuradhawati, R., Gunawan, W., Yovinus, Y., Sufianto, D., Djatah, S., Permana, D., Rusfiana,

- R., & Rochaeni, A. (2022). Pemberdayaan Ormas Pemuda Pancasila dalam Upaya Menjaga Kekondusifan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kecamatan Cinambo Kota Bandung. *Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma*, 3(2), 140–150.
- Priyowidodo, G., Indrayani, I., Sari, Y. D., & Gunawan, S. (2019). Digital media technology as an instrument for promotion and political marketing in the era of industrial revolution 4.0. *ACM International Conference Proceeding Series*, 327–331. <https://doi.org/10.1145/3345120.3345171>
- Ramadani, R., Nur, M., & Bima, M. R. (2025). Unraveling Legal Antinomies: Key Insights from the 2024 Simultaneous Regional Head Election. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 137–159. <https://doi.org/10.22304/pjih.v12n1.a7>
- Sugiharti, E., & Aras, M. (2021). Instagram as regional leader's personal branding medium: A case study of head of sumedang District – Indonesia's instagram account. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 99(22), 5395–5406. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85120889408&partnerID=40&md5=78be9aea82cd5b82c68e5c9ce51347c0>
- Wahyuni, S., Pujiharto, P., Pratama, B. C., & Azizah, S. N. (2023). Analysis of the rate of growth of intellectual capital ability in predicting present and future profitability of Sharia commercial banks in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 8(2), 194–206. <https://doi.org/10.1108/AJAR-10-2021-0226>
- Warganegara, A. (2021). *Pilkada, Kohesi Sosial dan Pandemi Covid 19: Kajian Peniadaan dan Penundaan Pilkada 2020*. 217–232.
- Widyastuti, R., Setiawan, R., Solihati, N., Darodjah, S., Hidajat, K., Mauludin, M. A., Lubis, A., Syamsunarno, M. R. A. A., Prastowo, S., Saili, T., & Boediono, A. (2023). Farmer Characteristics and Knowledge of Reproductive Management Practice in Traditional Dairy Goat Farming at Simpay Tampomas Farmers Group, Sumedang, West Java Indonesia. *Advances in Animal and Veterinary Sciences*, 11(11), 1823–1829. <https://doi.org/10.17582/journal.aavs/2023/11.11.1823.1829>
- Yarni, M., Prasna, A. D., Yetniwati, Y., & Saputra, B. (2024). Democratic Values in Nagari: An Analysis on Electoral System Shifts in One Province of Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 7(2), 379–392. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v7i2.12106>
- Zahro, S., Kamilah, M. N., Ardiansyah, M., Safitri, I. M., Naharina, P. S., & Waraswati, A. N. (2023). Kesadaran Berpolitik di Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(2), 49–64.